

## **PEMAHAMAN KOMPETENSI LINTAS BUDAYA BAGI UNTSO (*UNITED NATION TRUCE SUPERVISION ORGANIZATION*) UNTUK MEMECAH KEBUNTUAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PALESTINA-ISRAEL**

Raden Mas Jerry Indrawan  
*UPN Veteran Jakarta*  
[jerry\\_indrawan18@yahoo.co.id](mailto:jerry_indrawan18@yahoo.co.id)

### **ABSTRACT**

UNTSO was the first peacekeeping mission created by the United Nations. They have come to the Middle East since June 1948 with the task of overseeing the implementation of the ceasefire between Israel and Arab countries, including seeking resolution of the conflict between Israel and Palestine. One of the reasons many UN peace missions have failed, including UNTSO, was because the peacekeepers do not have the ability to understand the local culture in which they are placed. One of the main difficulties faced by peacekeepers in a conflict involving two groups with two different cultures is uncertainty about cultural values. UNTSO personnel very rarely received training as such and like the usual army, their tendency is to use violence to solve conflicts. There should be a special cultural training focuses on developing an understanding of the cultural context, such as background orientation, origin, conflict parties, history, religion, customs, and local community language. This paper is trying to provide an analysis through an understanding of cross-cultural competency, which is expected to provide recommendations for resolving the Palestinian-Israeli conflict.

**Keywords:** UNTSO, Cross-Cultural Competence, Conflict, Resolution, and Negotiation

### **1. Pendahuluan**

Timur Tengah merupakan kawasan yang mempunyai daya tarik tersendiri bagi setiap orang dan setiap negara juga tentunya. Dunia tidak akan melepaskan pandangannya dari kawasan ini, karena memang sangat menarik untuk dikaji dengan segala kompleksitas isunya. Jika dilihat dari aspek historis, kawasan ini adalah tempat diturunkannya agama-agama samawi dengan penganut terbesar seperti Islam, Yahudi, dan Nasrani. Dari aspek ekonomi, negara-negara yang berada di kawasan ini adalah penghasil minyak dan gas terbesar yang selama ini menjadi penopang kebutuhan dunia akan energi. Dan dari aspek politik dan keamanan, kawasan ini memiliki letak geografis yang sangat strategis di dunia. Dengan demikian, setiap perkembangan yang terjadi di kawasan

tersebut selalu menjadi perhatian bagi dunia internasional.

Salah satu persoalan yang paling menonjol di Timur Tengah adalah masalah Israel dan Palestina yang masih bergejolak hingga saat ini. Konflik ini mulai muncul ketika Majelis Umum PBB, mengeluarkan resolusi yang membagi wilayah Palestina menjadi tiga bagian, yaitu: wilayah Arab Palestina, wilayah Israel, dan Jerusalem sebagai wilayah yang dikelola oleh dunia internasional. Bangsa Palestina berkeberatan dengan resolusi tersebut, dengan kemudian menolak pembagian seperti itu. Hal ini dikarenakan pembagian tersebut memberikan pada bangsa Yahudi wilayah yang lebih besar dari wilayah yang diberikan untuk bangsa Palestina. Padahal, pada kenyataannya bangsa Palestina adalah bangsa mayoritas yang mendiami wilayah

tersebut, sementara bangsa Yahudi hanyalah sepertiga dari seluruh penduduk. Hal inilah yang akhirnya menimbulkan konflik antara Palestina dengan Israel (Findley, 1993: 39). Setelah itu, berdasarkan resolusi PBB tersebut bangsa Yahudi kemudian mengambil langkah berani untuk memproklamasikan negara Israel pada tanggal 14 Mei 1948 sebagai negara merdeka (kemudian diakui oleh banyak negara, termasuk Amerika Serikat), dengan wilayah teritorial yang ditentukan oleh *United Nation Partition Plan* (Findley, 1993: 44).

Sejak berdirinya negara Israel ini, orang-orang Yahudi yang tersebar di seluruh dunia mulai berdatangan ke tanah Palestina. Bangsa Yahudi ini kemudian, menyusun konsep yang matang untuk menguasai seluruh wilayah Palestina. Kepercayaan religius yang menyatakan bahwa di wilayah ini merupakan tanah yang dijanjikan oleh Tuhan mereka membuat semakin banyak orang Yahudi datang dan yakin untuk menetap di Palestina. Saat ini, hampir seluruh wilayah Palestina yang kini sudah berada dalam genggaman Israel tidak akan mungkin untuk dilepaskan (Sriyono, 2004: 113).

Di lain pihak, berdirinya negara Israel ini mengakibatkan banyak warga Palestina yang berdiaspora untuk membebaskan diri mereka dari penjajahan Israel. Mereka meninggalkan tanah airnya menuju ke berbagai negara-negara tetangga (Sihbudi, 1993: 25). Israel terus berusaha untuk memperbesar wilayah kekuasaannya. Berbagai cara ditempuh untuk mewujudkan ambisinya, mulai dari menindas penduduk Palestina sampai pada aneksasi negara-negara tetangganya. Hal tersebut dimulai sejak awal berdirinya negara ini dengan melakukan perang dengan Libanon, Yordania, Mesir, Irak, dan negara Arab lainnya untuk memperebutkan Tepi Barat dan Jalur Gaza. Pada tanggal 5-11 Juni

1967, Israel mengalahkan Mesir, Suriah, dan Jordania dalam perang Enam Hari. Karena kemenangan ini Israel menduduki Sinai, Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Dataran Tinggi Golan. Sejak 1982, Sinai dikembalikan sepenuhnya kepada Mesir. Pada peperangan ini Israel berhasil merebut lebih dari 70% dari luas total wilayah mandat PBB (Kuncahyono, 2009: 11).

Dibentuknya UNTSO di Timur Tengah sejak 1948 sampai hari ini menimbulkan tanda tanya besar bagi kita. Apakah misi perdamaian mereka di sana gagal? Masih efektifkah peran UNTSO sebagai penengah konflik Palestina-Israel? Tulisan ini mencoba untuk memberikan sebuah analisa melalui pemahaman kompetensi lintas budaya, yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang solutif bagi penyelesaian konflik Palestina-Israel.

## **2. Hasil dan Diskusi**

### **2.1. Sejarah Palestina dan Israel**

Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memberikan sedikit gambaran umum tentang dua bangsa yang terlibat dalam konflik ini, yaitu bangsa Palestina dan bangsa Israel. Dahulu, Palestina dikenal dengan sebutan bangsa *Philistine* (Filistin), yang adalah sebuah bangsa pelaut, campuran berbagai macam etnis dari Turki dan Yunani (pulau Crete) yang berlayar dari Laut Aegea menuju wilayah Laut Mediterranean timur. Bangsa Palestina bukan orang Palestina, bukan bangsa Palestina, melainkan adalah orang-orang Arab yang tinggal, lahir, atau bekerja di tanah Palestina. Sebelum Islam berkembang di abad 7 M, telah banyak saudagar Arab bermukim di Palestina. Setelah Islam berkembang dan Khalifah Umar bin Khattab berhasil merebut Palestina dari tangan Romawi, banyak orang Arab menetap di Palestina.

Negeri Palestina dengan kota Yerusalemnya memang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan beragama umat Islam, mengingat Yerusalem juga merupakan lokasi salah satu bangunan suci umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa (*Baitul Maqdis*). Mesjid ini merupakan salah satu dari tiga masjid utama Islam yang disucikan, selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Di Masjidil Aqsa inilah Nabi Muhammad SAW memperlihatkan mukjizat *Mi'raj*-nya. Setelah bangsa Arab menetap berabad-abad di Palestina, mereka berkembang menjadi mayoritas. Wajar jika mereka kemudian menganggap Palestina sebagai negeri dan tanah airnya (Harms, 2008: 3-4).

Saat Palestina dikuasai Turki pada 1517–1919, orang-orang Yahudi mulai kembali menetap di Palestina. Sampai 1914, penduduk Yahudi baru berjumlah 90.000 orang diantara mayoritas penduduk Arab. Meski demikian kedua bangsa itu bisa hidup berdampingan secara damai. Pertentangan Arab-Palestina baru terjadi sejak Palestina dikuasai Inggris (1920–1948), yaitu saat imigran-imigran Yahudi membanjiri Palestina dengan membawa cita-cita Zionisme, suatu cita-cita yang mengancam hak hidup bangsa Arab-Palestina di negeri dan tanah airnya sendiri (Harms, 2008: 4).

Kemudian, setelah mengetahui sedikit tentang gambaran bangsa Palestina mari kita melihat juga gambaran umum tentang bangsa Israel. Israel adalah sebuah negara di Timur Tengah yang dikelilingi Laut Tengah, Lebanon, Suriah, Yordania, Mesir dan gurun pasir Sinai. Menurut kisah kitab-kitab suci umat Islam, Kristen, maupun Yahudi, bangsa Arab dan Yahudi sesungguhnya serumpun, yakni keturunan Nabi Ibrahim, seorang nabi yang karena imannya meninggalkan Mesopotamia menuju sebuah tanah asing yang dijanjikan Tuhan, yakni Kanaan (disebut demikian karena wilayah ini pernah dikuasai oleh bangsa Kenite, namun pernah juga di sebut

Palestina ketika bangsa Filistin menguasainya). Bangsa Arab yang sejak semula menetap di Jazirah Arabia berasal dari keturunan putra Nabi Ibrahim yang tertua (Ismail). Sedang dari putra kedua (Ishak), turun ke Nabi Yakub, yang salah satu di antara keturunannya adalah Yehuda (kerap disebut Yahudi) (Harms, 2008: 13).

Sejarah bangsa Israel di Palestina telah dimulai sekitar abad 14 sebelum masehi. Kerajaan Israel yang pertama berkembang di masa pemerintahan Nabi Daud, yang membangun kota benteng di atas bukit Zion, yang dinamai Jerusalem. Kerajaan Israel menacapai puncak kejayaannya di masa pemerintahan Nabi Sulaiman putra Daud (sekitar 975–935 SM). Di zaman inilah didirikan bangunan suci Israel yang megah di Yerusalem, yang disebut disebut Baitullah atau Heikal Sulaiman, yang kemegahannya selalu dikenang oleh bangsa Yahudi sepanjang masa. Sepeninggal Sulaiman kerajaan Israel cepat mundur karena perpecahan, sehingga sejak abad 8 SM, bangsa Israel berturut-turut silih berganti dijajah Bangsa Assyiria, Babilonia, Persia, Yunani, dan Romawi. Ketika pada tahun 586 SM bangsa Babilonia menyerang Israel, Kota Jerusalem dan Baitullah dihancurkan, dan ribuan orang Israel dijadikan budak (Harms, 2008: 13-14).

Pada tahun 70 SM, bangsa Romawi berhasil menguasai wilayah tersebut dan hampir separuh penduduk terbunuh dan sisanya dievakuasi. Namun bisa diredam oleh Jenderal Vespasianus, dan untuk kedua kalinya Kota Jerusalem dibakar. Sejak peristiwa itu, banyak orang-orang Yahudi makin tersebar di mana-mana (diaspora). Kemudian secara diam-diam orang Arab berusaha kembali, begitu pula dengan bangsa Yahudi. Palestina kemudian direbut oleh Kerajaan Islam Arab di bawah pimpinan Khalifah Umar ( $\pm$  600 tahun M). Orang-orang Arab berdatangan ke kota

Jerusalem dan mengembangkan agama Islam. Meskipun Jerusalem berada di bawah kekuasaan Islam, namun orang-orang Arab memberikan toleransi yang besar kepada orang-orang Kristen dan bangsa Yahudi untuk beribadah dan belajar bahasa Arab (Harms, 2008: 14).

Setelah orang-orang Yahudi pergi meninggalkan negeri mereka dan tersebar di berbagai negeri, sehingga jumlah penduduk Yahudi di Palestina semakin menipis, sedang penduduk Arab yang semula pendatang semakin bertambah banyak. Tetapi sejak akhir abad ke-19, orang-orang Yahudi berhasil masuk ke Palestina berkat dukungan gerakan Zionisme (1877) yang diprakarsai oleh Theodore Herzl (1860-1904). Zionisme pada awalnya adalah gerakan keagamaan yang kemudian dipolitisasi sehingga menjadi sebuah gerakan politik yang radikal (Harms, 2008: 23).

## 2.2. Sejarah UNTSO

Setelah memahami tentang kedua bangsa yang bertikai, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang UNTSO (United Nation Truce Supervision Organization). PBB telah menaruh perhatian pada situasi di Timur Tengah dari awal organisasi ini berdiri. Selama bertahun-tahun, sebagai tanggapan terhadap berbagai konflik ada, PBB telah merumuskan prinsip-prinsip penyelesaian damai dan membuat sejumlah operasi pemeliharaan perdamaian. Sebelum UNTSO didirikan, pada bulan November 1947, Majelis Umum PBB mendorong rencana pembagian wilayah Palestina agar terjadi pembentukan negara Arab dan negara Yahudi, di mana Jerusalem ditempatkan di bawah status internasional. Rencana ini tidak diterima oleh orang Palestina maupun negara-negara Arab di sana. Pada 14 Mei 1948, Inggris Raya melepaskan mandatnya atas Palestina dan

negara Israel pun terbentuk. Pada hari berikutnya, Palestina yang dibantu negara-negara Arab membuka permusuhan terhadap Israel.

Pada tanggal 29 Mei 1948 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 50 yang meminta penghentian permusuhan di Palestina dan memutuskan bahwa proses gencatan senjata harus diawasi oleh mediator dari PBB, dengan bantuan sekelompok pengamat militer. Kelompok pengamat militer pertama adalah UNTSO yang bermarkas di Gedung Parlemen di Jerusalem, Israel. UNTSO adalah misi pemeliharaan perdamaian pertama yang dibuat oleh PBB. Mereka datang ke Timur Tengah sejak Juni 1948. UNTSO bertugas sebagai badan pengamat militer yang memonitor suatu persetujuan dan pelaksanaan gencatan senjata yang terjadi antara pihak yang bertikai di Timur Tengah. Selain itu, UNTSO juga bertugas mencegah berkembangnya suatu tingkat kerawanan di daerah operasinya dan tidak kalah pentingnya adalah peranannya dalam memberi bantuan asistensi kepada Badan PBB yang lain, yang berada dalam wilayah operasinya (UN, tanpa tanggal).

Pada bulan Agustus 1949, Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 73, memberikan fungsi yang baru kepada UNTSO yang sejalan dengan empat perjanjian gencatan senjata antara Israel dengan empat negara Arab tetangganya (Mesir, Yordania, Suriah, dan Lebanon. Aktivitas UNTSO meliputi wilayah-wilayah dari kelima negara tersebut. Sejak itu, pengamat militer dari UNTSO tetap tinggal di Timur Tengah untuk mengamati gencatan senjata, mensupervisi perjanjian gencatan senjata, mencegah insiden-insiden kecil membesar, dan membantu operasi pemeliharaan perdamaian PBB lainnya di wilayah tersebut. Saat ini UNTSO bermarkas di Yerusalem dan kantor penghubung di Beirut (Lebanon), Ismailia

(Mesir), dan Damaskus (Suriah). UNTSO juga terlibat dalam upaya resolusi konflik antara Palestina dan Israel, utamanya pasca gencata senjata antara Israel dengan negara-negara Arab di Timur Tengah (UN, tanpa tanggal).

Dalam perkembangannya, untuk menghadapi situasi konflik di Israel dan Palestina yang naik turun, khususnya ketika invasi Israel di Semenanjung Sinai tahun 1956, dibentuklah UNEF I (*United Nation Emergency Force*). UNEF diusulkan oleh Sekjen PBB kala itu Dag Hammarskjold, dan didukung oleh Sidang Umum PBB dan Kepala Staf UNTSO Jenderal E.L.M. Burns dari Kanada. Jenderal Burns sendiri ditunjuk menjadi komandan UNEF yang pertama. Respon terhadap permintaan PBB yang meminta kontingen nasional untuk bertugas di UNEF secara mengejutkan ternyata cukup baik. Dua puluh empat negara menawarkan untuk mengirim tentara. Hammarskjold menyeleksi sepuluh negara, yaitu Brasil, Kanada, Kolombia, Denmark, Finlandia, India, Indonesia, Norwegia, Swedia, dan Yugoslavia. Pasukan baru akhirnya terbentuk berkekuatan 3.378 personel. Salah satu masalah yang harus diselesaikan adalah bagaimana mengidentifikasi pasukan sebanyak itu. Untungnya, terdapat cukup banyak helm dari Amerika yang tersedia di Eropa, dan tidak menjadi masalah apabila semuanya harus di cat biru. Dari sinilah sejarah helm biru PBB dimulai (PKC-Indonesia, tanpa tanggal).

Setelah misi UNEF I berakhir pada tanggal 23 Oktober 1973, PBB selanjutnya membentuk UNEF II. Setelah banyak diwarnai perdebatan diplomatik tentang pembentukan UNEF II, Dewan Keamanan PBB setuju pada tanggal 25 Oktober untuk mengerahkan pasukan UNEF II untuk menengahi konflik pasca Perang 6 Hari antara Israel dan negara-negara Arab. Sekjen PBB Kurt Waldheim merekomendasikan Kepala UNTSO, Jenderal Siilasvuo dari

Finlandia, sebagai Komandan Interim UNEF. Pasukan Austria, Finlandia, dan Swedia dari UNIFICYP (*United Nation Peacekeeping Force in Cyprus*) dikirim dalam waktu 24 jam. Akhirnya, sebanyak tiga belas negara berpartisipasi dalam misi UNEF II, mereka adalah Swedia, Austria, Finlandia, Australia, Ghana, Nepal, Irlandia, Peru, Panama, Indonesia, Senegal, Kanada, dan Polandia. Kekuatan maksimumnya sebanyak 4031 personel, dan 120 pengamat dari UNTSO membantu pasukan ini (PKC-Indonesia, tanpa tanggal).

### 2.3. Kompetensi Lintas Budaya

Setelah sedikit banyak mengetahui tentang UNTSO, saya mengambil kesimpulan bahwa misi-misi penjaga perdamaian (orangnya disebut *peacekeepers* dan salah satu tahapannya sering disebut dengan istilah *peacekeeping*) mengalami banyak tantangan. Banyak yang meragukan keberhasilan operasi-operasi perdamaian yang mereka lakukan. Hal ini terlihat jelas dalam misi-misi UNTSO di Timur Tengah, utamanya dalam resolusi konflik Palestina dan Israel. Sampai saat ini, misi-misi tersebut belum membuahkan hasil. Konflik antara kedua pihak tidak hanya bertahan, bahkan meningkat.

Salah satu penyebab utamanya adalah karena para *peacekeepers* tidak memiliki kemampuan untuk memahami dan mengerti budaya lokal di mana mereka ditempatkan, alias tidak memiliki kompetensi lintas budaya. Salah satu kesulitan utama yang harus dihadapi para penjaga perdamaian dalam sebuah konflik yang melibatkan dua kelompok dengan dua budaya yang berbeda adalah ketidakpastian tentang nilai-nilai budaya (Pedersen, 2001: 1). Pengetahuan akan budaya lokal (pengetahuan lintas budaya) adalah sebuah konsep yang dapat saya tawarkan untuk

UNTSO dalam hal ini, sebagai upayanya meresolusi konflik Palestina dan Israel ini.

Sebuah ciri penting dari proses *peacekeeping*, sekaligus memahami kompetensi lintas budaya, adalah keharusan untuk mengerti konsepsi-konsepsi budaya dari suatu konflik, struktur dari masyarakat lokal yang mungkin dapat mempengaruhi sifat-sifat dari konflik tersebut. Selain itu, mekanisme budaya yang mereka miliki untuk menangani konflik sering juga disebut dengan teori *ethnoconflict* dan *ethnopraxis*. Intervensi *peacekeeping* hanya menentukan proses-proses berdasarkan asumsi-asumsi budaya pihak luar saja tentang konflik dan bagaimana resolusinya. Cara ini gagal untuk memperhitungkan kerangka budaya yang ada di dalam, di mana konfliknya melekat.

Sebagai contoh, isu imparialitas (ketidakberpihakan) telah luas diperdebatkan dalam upaya-upaya resolusi konflik. Pandangan umum di Barat tentang peran dari pihak ketiga mengatakan bahwa ketidakberpihakan diperlukan dalam upaya resolusi konflik yang efektif. Akan tetapi, perpektif budaya menunjukkan bahwa bukan hanya tidak perlu bagi pihak ketiga untuk tidak berpihak, tetapi juga tidak diinginkan dan tidak mungkin. Dalam banyak budaya, pihak ketiga yang datang dari dalam konflik itu sendiri mendapat penerimaan dan legitimasi dari keterikatannya dan hubungan yang dipercaya dengan pihak-pihak yang berkonflik. Wehr dan Lederach telah mengembangkan konsep “orang dalam yang memihak”, sebagai kontradiksi dari “orang luar yang netral” (Bar-Tal, 1998: 23).

Dalam misi-misi penjaga perdamaian setelah perang dingin, mempertahankan persetujuan dan legitimasi dari tindakan “mengintervensi” negara lain dalam konteks *humanitarian* telah sangat serius ditantang. Dalam beberapa kasus, contohnya seperti di Bosnia, Somalia, dan Rwanda, kita sudah kehilangan prinsip-prinsip fundamental demi sebuah hal yang disebut intervensi

kemanusiaan. Untuk terus mendapatkan persetujuan dan legitimasi, pemahaman dan pengenalan akan budaya yang lebih lengkap dan lebih baik dari sebuah konflik dan pihak-pihak yang berkonflik sangatlah penting. Persetujuan akan diberikan apabila pihak-pihak yang berkonflik merasa paham dan juga dijadikan “*shareholders*” dalam proses perdamaian. Intervensi akan dipandang legal apabila masyarakat internasional diberikan waktu untuk mengerti dan mendukung sumber daya dan institusi lokal. Interaksi antara militer dan penjaga perdamaian sipil menjadi amat esensial karena dua pihak ini harus bisa bersatu untuk menghadapi kelompok-kelompok lokal dengan budaya yang beragam dan populasi orang lokal dengan budaya yang juga sangat kompleks. Akan tetapi, konsep seperti ini mendapatkan perhatian yang sangat minim (Bar-Tal, 1998: 29).

Konflik Palestina-Israel menjadi *intractable* juga karena beragamnya kepentingan dari masing-masing “*shareholders*” di sana. Hal ini menjadikan tanpa memahami budaya lokal dan segala kompleksitasnya, akan sulit untuk menyelesaikan sebuah konflik yang sudah masuk tataran konflik berskala luas dan panjang seperti Palestina-Israel. Karena itu konflik *intractable* sangatlah melelahkan, menuntut, mengakibatkan stres yang berlebihan, menyakitkan, dan tentunya juga mahal (dalam konteks sumber daya manusia maupun material). Untuk itu, diperlukan *peacekeepers* yang mampu beradaptasi dalam situasi konflik secara individu maupun dalam kehidupan sosialnya. Adaptasi sosial budaya yang baik memerlukan kondisi militer, ekonomi, politik, sosial, dan psikologi yang baik pula (Bar-Tal, 1998: 45). Dan pelatihan terhadap personel UNTSO termasuk salah satu di dalamnya.

Tahun 1976, Johan Galtung and Helge Hveem mengangkat masalah ini dalam sebuah studi tentang penjaga perdamaian Norwegia di Gaza (UNEF) dan Kongo (ONUC). Mereka berusaha untuk mengeksplorasi peran pasukan PBB seperti yang ditunjukkan oleh beberapa tentara mereka sendiri. Alasan mereka adalah, walaupun tentara PBB (saat ini terlibat sebagai penjaga perdamaian yang masih tradisional) memiliki peran yang minimal dan jarak sosial yang cukup jauh dengan situasi konflik di sana, mereka terkadang dihadapkan pada tugas-tugas yang lebih aktif untuk berusaha membawa semua pihak duduk bersama. Hal ini adalah tanggung jawab pihak ketiga dari proses *peacemaking* yang dilakukan dalam operasi perdamaian PBB (Duffey, 2000: 142).

Dalam kasus-kasus berikutnya, pengetahuan akan budaya lokal sangatlah fundamental. Karena itulah temuan Galtung dan Hveem tidak terlalu mengejutkan. Mereka menemukan bahwa pasukan penjaga perdamaian menginginkan kedekatan dengan penduduk lokal, karena mereka ingin mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konflik tersebut dan juga budaya lokalnya. Dan mereka juga ingin pelatihan bagaimana caranya berhadapan dengan orang-orang dari negara lain. Galtung dan Hveem juga menemukan fakta bahwa pasukan perdamaian hanya mendapat informasi sedikit dari taklimat pimpinan mereka. Kebanyakan informasi yang mereka dapatkan soal konflik tersebut berasal dari pembicaraan dengan sesama pasukan UN atau membaca buku-buku dan surat kabar terlebih dahulu, daripada pelatihan-pelatihan formal tentang budaya lokal (Duffey, 2000: 143-144).

Personel UNTSO sangat jarang mendapat pelatihan seperti demikian, jadi apabila menghadapi konflik, kecenderungan mereka adalah dengan menggunakan kekerasan, seperti layaknya tentara pada

umumnya. Di sinilah peran kompetensi lintas budaya menjadi penting karena pendekatan yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel umumnya parsial dan reaktif, tidak komprehensif dan preventif. Padahal, pentingnya mengetahui akar sejarah bangsa Palestina dan Israel, dan juga sejarah panjang konfliknya, adalah bagian dari kompetensi lintas kultural yang pasukan penjaga perdamaian harus miliki untuk menyelesaikan konflik tersebut (Duffey, 2000: 149-150).

Sangat jarang elemen-elemen budaya dari sebuah masyarakat yang berkonflik itu dimengerti oleh komunitas internasional. Jalur-jalur kontak yang formal maupun informal tidak diciptakan, orang-orang lokal tidak diajak konsultasi, dan informasi yang mencukupi tidak dikumpulkan untuk memandu pembuatan dari kebijakan mengintervensi dan prakteknya. Sangat jarang seorang penjaga perdamaian, diplomat, aktivis kemanusiaan datang di sebuah konflik dan menyadari, bahwa kelompok masyarakat lokal mempunyai konsep yang berbeda tentang sebuah konflik, cara yang berbeda untuk menyelesaikannya, dan pendekatan sehari-hari yang berbeda dalam upaya mendekati kelompok masyarakat lokal tersebut (Duffey, 2000: 154).

Untuk itu, dalam upaya meresolusi konflik *intractable* di Palestina-Israel, maka diperlukan sebuah pelatihan budaya untuk para *peacekeepers* yang terlibat di sana agar memiliki kompetensi lintas budaya. Pelatihan budaya ini harus menyertakan dua komponen mandiri, yaitu budaya-umum dan budaya-khusus. Fungsi dari pelatihan budaya-umum adalah untuk memberikan pengertian tentang perbedaan-perbedaan budaya dan implikasinya terhadap interaksi antarpersonal. Ini termasuk mendalami bagaimana kerangka pemikiran budaya seorang individu mempengaruhi

kepercayaannya, nilai-nilai yang dianutnya, asumsi-asumsi dan sifat-sifatnya, dan bagaimana pengalaman budaya pribadinya telah membentuk konsepsinya tentang konflik, serta upaya-upaya pengelolaan dan resolusinya (Duffey, 2000: 154-155).

Setelah peserta pelatihan memperoleh tingkat kesadaran budaya yang meningkat, meninggalkan akar-akar etnosentrik dan sentimen-sentimen primordial, materi pelatihan selanjutnya harus lebih difokuskan pada peningkatan kemampuan komunikasi antarbudaya, baik verbal maupun nonverbal. Pelatihan budaya-umum juga harus memasukkan pengembangan kesadaran budaya organisasi militer dan sipil, termasuk ajang sosialisasi bersama yang menguntungkan, yaitu latihan bersama dan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan dan memelihara kerjasama (Duffey, 2000: 155).

Pelatihan budaya yang khusus berfokus pada pengembangan pemahaman dan kompetensi terhadap konteks budaya, dalam istilah *peacekeeping* yaitu budaya tuan rumah di mana intervensi akan dilakukan. Ini termasuk orientasi terhadap latar belakang, asal muasal, pihak-pihak yang berkonflik, sejarah, agama, adat istiadat, dan bahasa masyarakat lokal di sana. Pelatihan budaya secara khusus menyangkut penjelajahan terhadap dinamika budaya sebuah konflik dan perdamaian, dan juga metode-metode tradisional untuk menangani konflik, termasuk juga teori *ethnoconflict* dan analisis *ethnopraxis*. Kedua bentuk pelatihan ini harus dilakukan melalui kombinasi dari pengajaran, latihan partisipatif, permainan peran, dan simulasi langsung. Idealnya, pelatihan ini harus difasilitasi sebelum kedatangan pasukan atau penjaga perdamaian di daerah konflik (Duffey, 2000: 155-156).

Pelatihan budaya-umum ini dapat menjadi bagian dari program pelatihan awal untuk *peacekeepers* karena materi-materi

dasarnya yang harus diketahui semua personel. Akan tetapi, pelatihan budaya-khusus hanya dapat dilakukan apabila peserta pelatihan telah mengetahui tentang budaya yang akan ditujunya. Saat pelatihan pra-penempatan dilakukan, pelatihan khusus dapat juga dilakukan di lokasi-lokasi regional. Yang difokuskan dalam pelatihan ini adalah bahwa potensi terjadi kesalahpahaman budaya dapat diantisipasi begitu seorang diplomat, *peacekeepers*, atau aktivis kemanusiaan tiba di lapangan. Para *peacekeepers* bekerja dengan orang-orang dengan kelompok budaya yang berbeda, karena itu mereka harus memahami bahwa konsep-konsep perbedaan budaya dan menghormati perbedaan tersebut bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai langkah awal untuk mengembangkan solusi yang unik dan kreatif (Duffey, 2000: 156).

Ketika Amerika Serikat terlibat dalam Perang Irak, pasukan AS memiliki kepentingan yang sangat mendalam tentang bagaimana pemahaman personel militer mereka terhadap upaya memahami budaya asing. Semua pelayanan yang diberikan berpusat pada pelatihan budaya dan program-program pelatihan bahasa untuk “mempersenjatai” lebih banyak pasukan agar memiliki pengetahuan kritis tentang masyarakat dan tempat di mana mereka akan datang. Akan tetapi, Marinir AS ingin mencoba sesuatu yang lebih ambisius daripada hanya sekedar sensitivitas atau kesadaran budaya. Tidak hanya sekedar sensitif, tetapi juga memiliki kapabilitas yang cukup (Peters, 2007: 12-13).

Melalui sekolah-sekolah kepemimpinan yang profesional dan pelatihan pra-pemberangkatan, program ini secara sistematis mengajarkan para marinir di setiap tingkatannya bagaimana mengerti dinamika orang-orang lokal agar misi mereka berjalan lancar dan tidak hanya sekedar menghindari kesalahan. Program ini, dengan kata lain ingin para marinir

paham betul bagaimana budaya lokal sebagai alat taktis yang dapat menolong mereka di medan perang atau saat operasi-operasi pemulihan stabilitas pasca konflik. Untuk itu dibuatlah US Marine CAOCL (*Center for Advanced Operational Culture Learning*) di Quantico, Virginia, yang memungkinkan para marinir belajar budaya tidak hanya sebelum pemberangkatan tetapi juga selama sistem pendidikan profesional mereka (Peters, 2007: 13).

Konsepsi pendekatan sosial budaya yang dikemukakan Bar-Tal juga menarik, dia mengatakan bahwa *peacekeeper* perlu memahami permasalahan-permasalahan dan topik-topik terkait hal-hal khusus (*particular*) dalam suatu masyarakat, di mana hal-hal khusus tersebut bisa dikatakan sebagai sebuah hal yang unik juga dari masyarakat tersebut. Pemahaman sosial budaya yang dimaksud Bar-Tal tadi mencakup pemahaman akan karakteristik, struktur dan proses dalam sebuah masyarakat, termasuk domain-domain yang berbeda dalam kehidupan sosial mereka (Bar-Tal, 1998: 25). Materi-materi ini tentunya bisa ditambahkan pada pelatihan-pelatihan bagi personel UNTSO, maupun semua misi-misi perdamaian PBB di seluruh dunia dalam menangani sebuah konflik.

#### **2.4. Resolusi Konflik Lintas Budaya**

Resolusi konflik lintas budaya saya rasa dapat menjawab kondisi *stalemate* yang terjadi di Palestina dan Israel. Hal ini karena diskursus budaya mengarahkan perhatian pada masalah komunikasi antar budaya, interpretasi, dan kemungkinan metode pengambilan keputusan yang beragam. Hal ini membuat para analis dan praktisi sadar bahwa menangani konflik yang melintasi batas-batas budaya membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekedar menjembatani perbedaan-perbedaan yang sederhana, dan juga yang lebih mendasar. Mereka juga

harus sadar bahwa dalam konflik budaya yang sangat umum sekalipun, konflik etnis sebagai contoh, mereka juga harus berurusan dengan situasi konflik budaya yang rendah, walaupun konfrontasinya secara politis sangat tinggi.

Sebaliknya, beberapa konflik malah tidak terlihat seperti konflik budaya sama sekali, akan tetapi jika dilihat dari aspek kognitif, komunikatif, atau perspektif global, konflik ini sangat terpengaruh oleh budaya. Untuk meningkatkan pemahaman yang lebih baik akan konflik lintas budaya dan teknik-teknik resolusi konflik yang juga lebih baik, beberapa ahli dan praktisi telah berusaha untuk mengembangkan tipologi untuk membuat karakteristik terhadap berbagai jenis budaya, termasuk beberapa jenis yang berbeda dari masalah komunikasi antarbudaya, yang sesuai bagi prosedur-prosedur resolusi konflik pada setiap tipe-tipe konflik.

Banyak penelitian tentang resolusi konflik lintas budaya yang berfokus pada negosiasi, daripada penyelesaian melalui pihak ketiga seperti mediasi atau penggunaan fasilitator, atau dalam bentuk yang lebih khusus lagi seperti pelatihan untuk penyelesaian masalah (*problem solving*). Penelitian-penelitian seperti ini bergantung pada pembedaan antara gaya-gaya komunikasi "*high context*" dan "*low context*" yang dirumuskan oleh Edward T. Hall. Gaya *low context* berdasarkan penggunaan bahasa-bahasa instrumental, langsung, dan sederhana, dengan sedikit ketergantungan pada syarat-syarat paralinguistik, seperti pada ekspresi wajah, gestur atau bahasa tubuh. Gaya *high context*, adalah sebaliknya, berorientasi pada hal-hal yang ekspresif, tidak langsung, dan penggunaan bahasa yang bernuansa, dengan ketergantungan tinggi pada syarat-syarat paralinguistik (Hall, 1976: 54-55).

Gaya-gaya ini sering berkorelasi dengan individualistik (*low context*)

melawan budaya-budaya kolektif, saling bergantung, atau komunal (*high context*). Terkadang, mereka juga berkorelasi dengan beberapa asumsi dasar yang berbeda tentang sifat-sifat resolusi konflik atau proses negosiasi. Di satu sisi hasil lebih dipentingkan dalam hal ini (tipikal dari budaya-budaya individualis), dibandingkan dengan di sisi lain, di mana keseluruhan proses dengan menghargai hubungan-hubungan sosial yang ada. Beberapa peneliti telah melakukan investigasi terhadap orientasi-orientasi budaya yang berbeda yang berkaitan dengan pengambilan resiko atau upaya-upaya pencegahan (Hall, 1976: 55).

Hall juga telah melakukan penelitian tentang sifat-sifat budaya terhadap waktu, dengan membandingkan budaya "*monochronic*" (waktu bersifat linear dan tidak berulang, dan peristiwa serta tindakan sosial bergerak berurutan menuju hasil) dengan budaya "*polychronic*" (waktu bersifat melingkar dan berulang, dan peristiwa serta tindakan sosial terjadi pada waktu yang bersamaan terhadap akhir yang berulang juga). Asumsi tersebut mendasari semua tipologi, adalah bahwa ketika individu-individu dari kutub berlawanan, katakanlah *low context* melawan *high context*, berinteraksi antara satu dengan lainnya dalam sebuah perselisihan, atau sebagai negosiator dalam upaya meresolusi sebuah perselisihan, efek dari perbedaan-perbedaan tersebut cukup kuat untuk menciptakan kejanggalan dalam komunikasi dan juga kesalahpahaman (Hall, 1976: 55).

Tidaklah juga penting untuk menerima semua prediksi-prediksi mengerikan dari cara berpikir ala *clash of civilizations*-nya Samuel Huntington untuk setuju bahwa di abad ini kita akan melihat jumlah hubungan yang meningkat antara individu-individu dari orientasi-orientasi budaya yang berbeda dalam bentuk interaksi transnasional tingkat tinggi. Untuk alasan

ini, sangat penting untuk mengerti dinamika dari komunikasi lintas budaya agar jika terjadi konflik maka penyelesaiannya dapat diupayakan secara efektif dan manusiawi (Avruch, dkk, 1998: 244).

Untuk itu, diperlukan proses yang dinamakan negosiasi sebagai sebuah solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel ini. Negosiasi dianggap sebagai salah satu jalan yang efektif untuk menciptakan perdamaian, membangun hubungan Palestina dan Israel sebagai dua negara yang bisa hidup berdampingan secara damai, dan tentunya memecah kondisi *stalemate* yang sudah berjalan puluhan tahun. Upaya ini harus disertai dengan niat baik antara kedua negara. Pihak Palestina sendiri telah menyatakan bahwa, negosiasi merupakan jalan satu-satunya untuk membangun perdamaian antara mereka dengan Israel. Hal ini sejalan dengan keinginan para *peacekeepers* (UNTSO) yang terlibat dalam diplomasi intensif dengan Israel, untuk menekankan bahwa satu-satunya solusi bagi kedua negara adalah melalui perundingan. Kesepakatan untuk melakukan negosiasi ini dapat mengantarkan Israel dan Palestina memulai proses penyelesaian konflik dan mencapai perdamaian.

UNTSO menurut saya adalah pihak yang paling pas untuk melakukan proses negosiasi. Tentunya setelah mereka mendapatkan pelatihan dan pemahaman komprehensif tentang kompetensi lintas budaya. Negosiasi yang dilakukan harus mempunyai tujuan yang jelas. Kedua belah pihak akan mencari solusi bagi permasalahan yang selama ini menjadi hal yang sangat substansial dan menjadi inti dari konflik Israel dan Palestina seperti isu wilayah, pemukiman, dan tawanan. Tentunya dengan pemahaman budaya yang dimiliki para penjaga perdamaian, dapat menjadi penengah yang baik (di luar debat

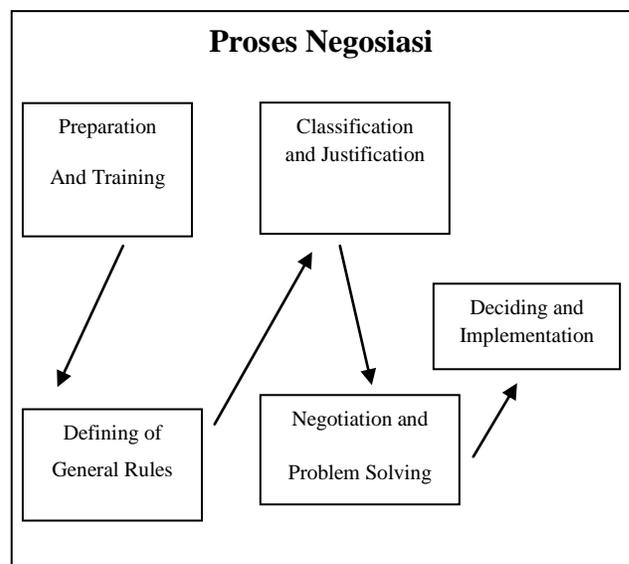
tentang imparialitas) untuk meresolusi konflik ini.

Pada hakekatnya, negosiasi adalah instrumen atau sarana untuk menjalin interaksi satu sama lain, baik yang bersifat internal dalam diri pribadi manusia sebagai pelaku negosiasi, maupun yang bersifat eksternal yang melibatkan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pelaksanaannya, negosiasi tidak dapat bersifat instan atau mempunyai batasan waktu. Negosiasi akan berproses sepanjang masa sampai tercapainya tugas-tugas yang harus dilaksanakan, dan hasil-hasil yang ingin dicapai baik melalui tahapan waktu ataupun mekanismenya. Negosiasi menjadi pilihan dalam menyelesaikan sebuah konflik atau permasalahan, karena dianggap sebagai alternatif yang paling baik. Kedua belah pihak bertemu langsung dan mengutarakan kepentingan masing-masing, untuk selanjutnya berunding mencari solusi yang paling tepat dan saling menguntungkan. Mereka harus mengesampingkan ego untuk memenuhi sedikit kepentingan orang lain. Sehingga pada akhirnya keduanya merasa menang dan kepentingannya terpenuhi. Akan berbeda jika suatu permasalahan diselesaikan melalui hukum, yang kemungkinan akhirnya akan ada yang menang dan ada yang kalah (Jamil, 2007: 89-90).

Negosiasi bertujuan untuk mendapatkan penyelesaian masalah bersama dengan melakukan kompromi terhadap perbedaan yang ada, sehingga mendapatkan penyelesaian yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Bukan penyelesaian yang justru saling merugikan (*lose-lose solution*) atau memenangkan salah satu pihak dan mengalahkan pihak yang lain (*win-lose solution*). Negosiasi menjadi pilihan instrumen untuk menyelesaikan suatu masalah, karena jalur ini memberikan jalan kompromi untuk saling memberikan sedikit pengorbanan, guna pencapaian solusi

bersama yang saling menguntungkan menjadi tujuan utamanya (Jamil, 2007: 90).

Negosiasi berbeda dengan proses penjualan. Dalam proses bernegosiasi kita membutuhkan waktu yang lebih banyak, dibandingkan dengan proses penjualan terutama pada tahap tawar-menawar. Selain itu, pihak pembeli dalam penjualan tidak memerlukan ikatan tertulis atau saling mengenal lebih dalam, tetapi dalam proses negosiasi, pihak-pihak yang bernegosiasi harus mengakhiri negosiasi dengan sebuah kesepakatan tertulis atau kontrak, dan sebaiknya saling mengenal satu sama lain secara mendalam. Negosiasi yang efektif adalah mengetahui bahwa kesepakatan tambahan setelah negosiasi tidak dianggap sebagai layanan yang cuma-cuma, melainkan harus dibalas dengan keuntungan apa yang akan didapat apabila layanan tersebut diberikan. Hindari juga menawarkan kompromi, terlebih dahulu, usahakan pihak lawan yang terlebih dahulu menawarkannya. Dalam proses negosiasi, ada beberapa tahapan yang harus dilalui seperti yang digambarkan dalam bagan berikut:



Sumber: Liliweri, 2005: 348

Seperti yang sudah disinggung di atas tentang bagaimana memecah kondisi *stalemate* di Palestina-Israel, menarik untuk kita lihat adalah bagaimana cara kita menangani *stalemate* tersebut. *Stalemate* adalah sebuah situasi di mana kedua belah pihak masih berbicara, namun nampaknya tidak akan terjadi kemajuan apapun untuk menciptakan sebuah kesepakatan. Jika hal ini terjadi, maka yang perlu dilakukan adalah mengubah dinamika negosiasi. Misalnya mengganti anggota tim negosiasi, mengubah tempat pertemuan, mengubah suasana dalam ruangan negosiasi dan lain sebagainya. Untuk UNTSO, mengubah konsep menjadi lebih *cultural-friendly* bisa kita masukkan sebagai upayanya menangani *stalemate* (Wijaya, 2011: 43-48).

Cukup banyak negosiasi yang sudah terjadi antara Palestina dan Israel sejak pecah konflik ini. Negosiasi pertama yang dilakukan oleh Palestina dan Israel adalah negosiasi yang dilakukan di Oslo dan menghasilkan Kesepakatan Oslo I pada tanggal 13 September 1993. Pada awalnya, Palestina dan Israel tidak pernah bersedia untuk duduk bersama menyelesaikan perselisihan mereka. Bagi keduanya, jika diadakan pertemuan langsung yang mempertemukan kedua belah pihak, maka akan dianggap memberikan pengakuan atau legitimasi terhadap keberadaan masing-masing pihak lawan. Legitimasi tersebut tentunya akan membahayakan kepentingan nasional Palestina maupun Israel di wilayah Palestina.

Pada awal tahun 1990-an, pandangan dari konflik menuju perdamaian mulai dirasakan terjadi pada Palestina dan Israel. Perubahan pandangan ini didasarkan atas terjadinya perubahan eskalasi konflik dan pertimbangan kekuatan di Timur Tengah pada rentang waktu 1987 hingga 1991. Kebangkitan Palestina untuk melawan penjajahan Israel pada akhir 1987 yang dikenal sebagai *intifada* menciptakan

kekhawatiran bagi kalangan masyarakat Israel (Findley, 1993: 121-122).

Perubahan eskalasi politik konflik ini pun, memicu dilakukannya proses negosiasi damai yang mulai ditangani secara serius. Berbagai proses negosiasi pun dilaksanakan baik itu negosiasi yang terjadi secara langsung, maupun negosiasi melalui pihak ketiga. Akan tetapi, menurut saya pihak ketiga ini belum memiliki pemahaman budaya yang mumpuni sehingga pendekatan yang dilakukan terhadap kedua belah pihak yang berkonflik pun masih semata pendekatan pragmatis. Pendekatan pragmatisme menurut saya hanya berorientasi pada hasil, bukan proses menciptakan perdamaian itu, serta efek jangka panjangnya apakah mampu terus damai atau sewaktu-waktu bisa pecah konflik lagi. Negosiasi yang dilakukan tersebut, dapat dijadikan sebagai pedoman penyelesaian konflik dan dapat memperoleh hasil yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Adapun hasil negosiasi yang telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak menghasilkan kesepakatan yang dapat dilihat pada beberapa perundingan yang terjadi hingga saat ini.

Dengan adanya dukungan yang besar dari pihak ketiga untuk mewujudkan perdamaian Palestina dan Israel, maka seyogyanya perdamaian tersebut tidak lagi menjadi mimpi tetapi segera terwujud. Untuk itu, diperlukan komitmen yang besar dari kedua belah pihak yang bertikai untuk berani menentukan sikap dan berkompromi satu sama lain. Palestina yang mengharapkan Israel mengakui batas wilayah seperti sebelum perang 1967 dan menghentikan seluruh proyek pemukiman Yahudi di wilayah Palestina. Sementara dipihak lain, Israel menginginkan pengakuan sebagai negara merdeka dari Palestina dan negara-negara Arab lainnya. Jika tuntutan kedua negara ini terpenuhi maka, solusi dua negara yang sudah dicetuskan pada kesepakatan

Oslo 23 tahun yang lalu dapat terwujud, yaitu Israel dan Palestina dapat berdiri berdampingan secara damai.

### 3. Kesimpulan

Salah satu ciri penting dari proses *peacekeeping* adalah keharusan untuk mengerti konsepsi-konsepsi budaya dari suatu konflik, struktur dari masyarakat lokal di mana para *peacekeepers* tersebut akan ditempatkan. Untuk itu pelatihan tentang budaya sangat penting untuk dilaksanakan bagi para penjaga perdamaian ini, apalagi dengan banyaknya misi-misi perdamaian PBB yang bisa dikatakan tidak terlalu berhasil. Selain itu, setelah memiliki pemahaman budaya lokal yang memadai, proses resolusi konflik dapat dilakukan melalui negosiasi.

Negosiasi bertujuan untuk mendapatkan penyelesaian masalah bersama dengan mengkopromikan perbedaan yang ada, sehingga mendapatkan penyelesaian yang saling menguntungkan, terlebih berbekal pemahaman budaya yang cukup yang dimiliki para *peacekeepers*. Negosiasi menjadi pilihan instrumen untuk resolusi konflik juga karena metode ini memberikan jalan kompromi untuk saling memberikan sedikit pengorbanan guna pencapaian solusi bersama yang menjadi tujuan utamanya.

Sebagai salah satu konflik terpanjang dalam sejarah umat manusia, perseteruan antara Palestina dengan Israel harus ditanggapi dengan hati-hati. Karena begitu banyak aspek yang terlibat dalam konflik tersebut, sekaligus latar belakang yang sangat rumit, menjadikan isu ini sebagai isu yang sangat sensitif. Bagi Indonesia, sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, konflik Palestina-Israel seringkali dibawa ke dalam ranah konflik agama, yang

sesungguhnya merupakan konklusi yang salah.

Terkait resolusi konflik lintas budaya, argumen-argumen dan pendapat-pendapat di atas tidak serta merta mengatakan bahwa budaya adalah akar dari semua masalah *peacekeeping*. Selain itu, pelatihan yang bagus dan persiapan yang lebih baik juga bukanlah jaminan bahwa masalah-masalah tidak akan timbul. Walaupun, pemahaman budaya tidak menjamin kesuksesan, akan tetapi ia mencegah penggunaan strategi yang salah dan tidak produktif. Budaya sebagian besarnya adalah dinamika yang tidak dikenali yang digunakan untuk berperan dalam sukses atau gagalnya proses resolusi konflik dalam *peacekeeping*. Apabila *peacekeeping* masih dianggap sebagai instrumen efektif dalam upaya menangani konflik-konflik kontemporer, maka langkah-langkah maju harus dilakukan untuk mengerti isu-isu budaya dalam semua tingkatan interaksi personal dan juga proses-proses implementasinya.

Dalam konteks ini maka resolusi konflik lintas budaya menjadi fundamen penting bagi kelanjutan upaya damai antara Israel dan Palestina, agar *peacekeeping mission*, dalam hal ini UNTSO, dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Pemahaman resolusi konflik lintas budaya yang dimiliki oleh setiap *peacekeepers* dapat menjadi instrumen atau sarana untuk menjalin interaksi satu sama lain, baik yang bersifat internal dalam diri pribadi manusia sebagai pelaku negosiasi, maupun yang bersifat eksternal, yang melibatkan Israel dan Palestina sehingga solusi damai dapat ditemukan dari dalam diri mereka sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Avruch, K., Peter W. B., & Joseph A. S. (Eds). (1998). *Conflict resolution: Cross-cultural perspectives*. New York: Praeger.
- Bar-Tal, D. (1998). Societal beliefs in times of intractable conflict: The Israeli case. *International Journal of Conflict Management*, 9(1), 22-50. <http://doi.org/10.1108/eb022803>
- Christie, D. J., Wagner, R. V., & Winter, D. D. N. (Eds). (2001). *Peace, conflict, and violence: Peace psychology for the 21st century*. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
- Duffey, T. (2000). Cultural issues in contemporary peacekeeping. *International Peacekeeping*, 7(1), 142-168. <http://dx.doi.org/10.1080/13533310008413823>
- Findley, P. (1993). *Deliberate deceptions: Facing the facts about the U.S.-Israeli relationship*. New York: Lawrence Hill Books.
- Hall, E. T. (1976). *Beyond culture*. New York: Doubleday.
- Harms, G. (2008). *The Palestine-Israel conflict: A basic introduction*. London: Pluto Press.
- Jamil, M. (2007). *Mengelola konflik membangun damai: Teori, strategi dan implementasi resolusi konflik*. Semarang, Indonesia: Walisongo Mediaton Centre.
- Kuncahyono, T. (2009). *Jalur Gaza: Tanah terjanji, intifada, dan pembersihan etnis*. Jakarta, Indonesia: Kompas.
- Liliwari, A. (2005). *Prasangka & konflik: Komunitas lintas budaya masyarakat multikultur*. Yogyakarta, Indonesia: LKiS Yogyakarta.
- Peters, K. M. (2007). Culture club. *Government Executive*, 39(5).
- PKC Indonesia. (N.d.). *Kontingen Garuda Indonesia di wilayah timur tengah*. Retrieved from <http://www.pkc-indonesia.com/index.php/sejarah/kontingen-garuda-indonesia-di-wilayah-timur-tengah/konflik-terusan-suez>
- Sihbudi, R. M., Basyar, M. H., & Zulkarnain, H. B. (1993). *Konflik dan diplomasi di Timur Tengah*. Bandung, Indonesia: Eresco.
- Sriyono, A., et al. (2004). *Hubungan internasional: Percikan pemikiran diplomat Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Gramedia Pustaka Utama.
- United Nations. (2017). *UNTSO (United Nations Truce Supervisions Organizations)*. Retrieved from <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/untso/index.shtml>
- Wijaya, C. S. (2011). *Jurus Maut Negosiasi*. Yogyakarta, Indonesia: Second Hope.